



Ulas Kurikulum Merdeka, Ujian Nasional dan Asesmen Nasional

BUDI Santosa Asrori yang dikenal gemar gowes ini juga menyinggung Kurikulum Merdeka yang memfasilitasi siswa agar lebih berkembang sesuai dengan potensi anak. Menurut dia, dalam menjalankan Kurikulum Merdeka guru perlu disiapkan agar dapat melayani semua anak sesuai dengan kondisi. Juga minat bakat dan potensi sehingga guru mampu menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi.

Menyiapkan guru, terang Budi, dibutuhkan peningkatan kompetensi dengan pelatihan. Namun demikian, pelatihan guru melalui platform merdeka mengajar (PMM) dirasakan kurang efektif. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya.

Dikatakan, PMM banyak konten video sehingga perlu variasi materi. Ini mengakibatkan guru kurang fokus mengajar. Waktu guru banyak tersita mengikuti pembelajaran PMM di depan komputer.

Itu mengurangi waktu yang



Belum semua guru mampu untuk melakukan asesmen potensi dan minat bakat anak."

BUDI SANTOSA ASRORI
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

seharusnya untuk mengajar. Saat terjadi kesulitan memahami konten, guru tak bisa bertanya langsung kepada penyusun konten sehingga harus menginterpretasikan sendiri.

"Belum semua guru mampu

untuk melakukan asesmen potensi dan minat bakat anak," ungkap Budi.

Faktor lainnya, guru kesulitan melaksanakan pembelajaran diferensiasi karena jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) yang banyak. Dalam kurikulum merdeka sekolah boleh tidak melaksanakan asesmen sumatif, akibatnya anak tidak termotivasi belajar.

Kenaikan kelas adalah hak anak. Namun, guru kesulitan karena harus menyampaikan materi yang belum dikuasai anak di tingkat sebelumnya. "Guru tetap menyampaikan materi bagi siswa

lainnya yang telah menguasainya di jenjang sebelumnya," ceritanya. Di bagian lain Budi juga mengulas soal Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang masih disalahartikan. Hanya menghasilkan produk yang ditampilkan saat kegiatan gelar karya dan bukan prosesnya.

"P5 dengan tiga tema terlalu banyak dalam setahun. Terjadi

pemborosan, waktu yang dialokasikan terlalu banyak. Dalam praktiknya anak-anak masih kurang mandiri. Orang tua masih banyak terlibat," papar pria yang berulang tahun setiap 15 September ini panjang lebar.

Dia juga mengupas Kurikulum Merdeka telah memiliki peraturan menteri yang mengatur tentang standar nasional pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Namun standar dalam peraturan menteri itu masih bersifat umum. Aturan lebih rinci dimuat dalam peraturan sekretaris jenderal (Persesjen) berupa buku panduan. "Buku panduan ini terlalu cepat dilakukan perubahan, sehingga menyulitkan sekolah dalam menerapkannya," kata ayah dua anak ini.

Ditanya soal gagasan menerapkan kembali ujian nasional (UN), Budi berpendapat perlu tetap dilaksanakan. Pertimbangannya, perlu adanya standar terkait

pemetaan mutu atau kualitas hasil belajar peserta didik kelas akhir. Tapi UN sebaiknya tak digunakan dalam syarat penentu kelulusan. Namun dapat digunakan sebagai salah satu alat seleksi dalam PPDB.

Lebih jauh dikatakan, UN memberikan standar nasional yang seragam dalam menilai hasil belajar siswa di berbagai daerah. Ini membantu dalam menilai kualitas pendidikan secara nasional dan memantau kemajuan dari tahun ke tahun. UN juga menciptakan rasa kompetisi di antara siswa, sekolah, dan daerah guna mencapai hasil terbaik yang bisa mendorong siswa belajar lebih giat.

UN juga sering dijadikan sebagai acuan seleksi jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti masuk ke SMA atau perguruan tinggi, sehingga memudahkan proses seleksi yang lebih objektif.

Budi juga menanggapi soal asesmen nasional (AN) yang

lebih menekankan pada literasi membaca, numerasi, dan karakter yang dianggap kompetensi dasar yang harus dimiliki semua siswa untuk menghadapi tantangan masa depan.

AN fokusnya pada pengembangan kualitas pembelajaran di sekolah. Tujuannya memperoleh data yang lebih akurat untuk memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruh. AN memberikan gambaran kondisi pendidikan di setiap satuan pendidikan sehingga lebih muda mengidentifikasi sekolah-sekolah yang memerlukan intervensi dan perbaikan.

Peserta AN hanya sampel. Sejumlah 30 siswa untuk SD kelas 5 dan 45 siswa SMP kelas 8. Jumlah ini belum bisa menggambarkan kondisi yang sesungguhnya bila jumlah siswa di satuan pendidikan tersebut banyak.

"Kesimpulan kami baik UN maupun AN perlu dilakukan karena masing-masing memiliki tujuan yang berbeda," ulas Budi. (kus/gp)

Kantor: UPT JPD Dinpora Kota Yogyakarta Jl. Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta | Telp: (0274) 563078 | Surel: jpd.diknasyk@gmail.com

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005